

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan dengan pendekatan studi kasus di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Selanjutnya nanti akan dibandingkan antara kondisi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas supaya dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini adalah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pejabat/pelaku kebijakan publik pada instansi terkait dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari data-data yang dikumpulkan dari studi sebelumnya maupun dari laporan-laporan yang dibuat dan diterbitkan oleh instansi terkait. Data yang

hendak dikumpulkan fokus kepada hal-hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.4 Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang valid mengenai pelaksanaan kebijakan publik lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wawancara dilakukan terutama terhadap Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *leading sector* pelaksanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Daftar wawancara yang direncanakan dilakukan guna memperoleh data-data dan informasi yang valid dan absah, yaitu pada pejabat/pelaksana terkait di instansi yang terlibat langsung dengan pelaksanaan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain :

- a. Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

- d. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
- e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
- f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
- g. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
- h. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- i. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- j. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
- k. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam *setting* social.

Menurut Meleong (Herdiansyah, 2010: 145-146) dokumen resmi dapat dibagi kedalam dua bagian. *Pertama* dokumen internal, yaitu dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi,

aturan suatu lembaga, system yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya.

Kedua, dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan melihat pada dokumen-dokumen resmi yang berupa laporan kegiatan, foto-foto, informasi dari media, baik berupa dokumentasi internal maupun eksternal yang dapat mendukung terhadap perolehan data yang valid guna menghasilkan penelitian yang valid juga.

3.5 Teknis Analisis Data

Pengertian Analisis data kualitatif menurut (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif menurut (Seiddel, 1998), proses perjalanan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice Mcdrury (*Collaborative Group Analysis Of Data*, 1999) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut .

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.

Analisis data, menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa ada yang menggunakan proses, ada pula komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisis data. Sehingga dapat dipahami bahwa urgensi sebuah analisis data yakni terjadinya sebuah proses yang menitikberatkan pada komponen-komponen yang ada. Sehingga di dapat sebuah temuan yang dapat dimaknai sebagai tujuan dari penelitian.

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan *computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS)*, Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus *software* ini dapat untuk menyimpan, mengorganisir, mengeksplorasi data dengan mudah dan memperkecil resiko kerusakan data asli. Pada Nvivo 12 Plus *software* ini dilakukan dengan proses import data dan *coding* data sesuai dengan jenis dan variabelnya. Dalam *coding* pada Nvivo 12 Plus ini dikenal adanya *noted* dan *case*. Selanjutnya, setelah melakukan coding dengan Nvivo 12 Plus, adalah analisis data dengan Nvivo 12 Plus.

Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Sesuai Indikator Penelitian

| Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik (Model George C. Edwards III) | Indikator (Penelitian) | Daftar Pertanyaan |
|---|---|--|
| <p>1. Komunikasi</p> | <p>1. Adanya pengetahuan dan pemahaman implementator secara kompleks, benar dan tepat terhadap perda yang akan diimplementasikan</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD yang berwenang untuk menyiapkan data KP2B indikatif secara efektif, jelas, akurat dan konsisten</p> <p>3. Adanya sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan</p> <p>4. Adanya kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian</p> <p>5. Terlaksananya rakor di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi</p> | <p>1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman implementator terhadap perda yang diimplementasikan?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang berwenang untuk menyiapkan data KP2B</p> <p>3. Apakah ada sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan? Bagaimana pelaksanaannya?</p> <p>4. Apakah ada kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian?</p> <p>5. Apakah ada rakor di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi? Bagaimana pelaksanaannya?</p> |
| <p>2. Sumberdaya</p> | <p>1. Tersedianya SDM yang mampu dalam menyiapkan data, sebaran lahan sawah dalam proses dan tahapan penetapan lahan.</p> | <p>1. Bagaimana kondisi sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan?</p> <p>2. Apakah sudah ada Peraturan Bupati atau peraturan sejenisnya</p> |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya penetapan sebaran lahan inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati 3. Adanya penetapan lahan penyangga LP2B oleh Pemerintah Kabupaten 4. Adanya sistem/peraturan tentang alih fungsi LP2B dan apabila ada bencana alam 5. Adanya penetapan LP2B ke dalam RTRW/RDTR 6. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan implementasi publik, misalnya adanya gedung kantor, komputer dan sarana IT yang lain | <p>mengenai penetapan sebaran inti dari lahan basah dan lahan kering? Bagaimana perkembangannya?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah sudah ada Peraturan Daerah yang menetapkan KP2B dan LP2B? Bagaimana perkembangannya? 4. Bagaimana pengaturan apabila terjadi alih fungsi LP2B dan apabila terjadi bencana alam pada LP2B? 5. Apakah sudah ada penetapan LP2B ke dalam RTRW/RDTR? Bagaimana perkembangannya? 6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang implementasi kebijakan seperti gedung kantor dan sarana IT/elektronik lainnya? |
| <p>3. Sikap Pelaksana</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemampuan dan keinginan yang kuat oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut 2. Adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan 3. Adanya efektivitas pelaksana kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap dan kapabilitas dari pelaksana kebijakan? 2. Adakah kesamaan persepsi dan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan? Jelaskan! 3. Apakah sikap pelaksana kebijakan sudah efektif dan efisien? |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| <p>4. Struktur Birokrasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur organisasi yang jelas pada birokrasi yang terkait dengan kebijakan PLP2B. 2. Adanya struktur birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan PLP2B 3. Adanya peran, tugas pokok dan fungsi yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing birokrasi yang terlibat di dalam implementasi kebijakan PLP2B 4. Adanya kewenangan dan hubungan yang jelas antara instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang terlibat implementasi kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana struktur organisasi pada birokrasi yang terkait dengan kebijakan PLP2B? 2. Apakah struktur birokrasi tersebut sudah efektif dan efisien? 3. Apakah peran, tugas pokok dan fungsi sudah dipahami oleh masing-masing birokrasi yang terlibat di dalam implementasi kebijakan PLP2B? 4. Bagaimana kewenangan dan hubungan antara instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang terlibat implementasi kebijakan? |
|------------------------------|--|---|

Sumber : Analisis Peneliti, 2019